

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Najla et al. (2024), pemanfaatan anggaran daerah untuk perencanaan atau kegiatan dalam jumlah yang dapat diukur selama periode waktu tertentu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kinerja keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan khususnya disektor pemerintah karena melalui aspek ini manajemen dan pemangku kepentingan dapat membuka kondisi serta perkembangan secara lebih mendalam (Ida Ayu Putu Ayunda Aprilia, Werastuti et al. 2024). Segala hak dan tanggung jawab daerah yang dapat diukur secara finansial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk segala kekayaan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Agar pemerintah dapat menghasilkan kinerja yang optimal dengan rencana anggaran yang telah disetujui sebelumnya, kinerja keuangan pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa baik sektor keuangan daerah beroperasi. Hal ini termasuk pendapatan dan belanja daerah melalui suatu sistem keuangan yang diatur oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. Kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan membiayai pembangunan serta pelayanan sosial masyarakat ditunjukkan melalui APBD (Ni Putu Ayu Septiyani Putri et

al. 2023).

Menurut pernyataan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan gambaran seberapa baik dan efisien anggaran daerah digunakan selama kurun waktu tertentu. Kinerja ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan anggaran yang dialokasikan serta melibatkan pengelolaan hak dan kewajiban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam APBD. Selain itu, anggaran juga memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, anggaran memiliki fungsi strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan (Purnamawati et al. 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sanger dkk. (2023) menyatakan bahwa APBD diatur oleh peraturan daerah dan berlaku untuk satu tahun anggaran, yang berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Aturan akuntansi pemerintah digunakan saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah disebut juga organisasi sektor publik adalah organisasi yang dalam kegiatannya melayani masyarakat dengan menggunakan dana publik, misalnya: yayasan, organisasi kesehatan/rumah sakit, lembaga pemerintah seperti Bapenda . Sebagai lembaga pemerintah, tugas utama Bapenda adalah mematuhi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang

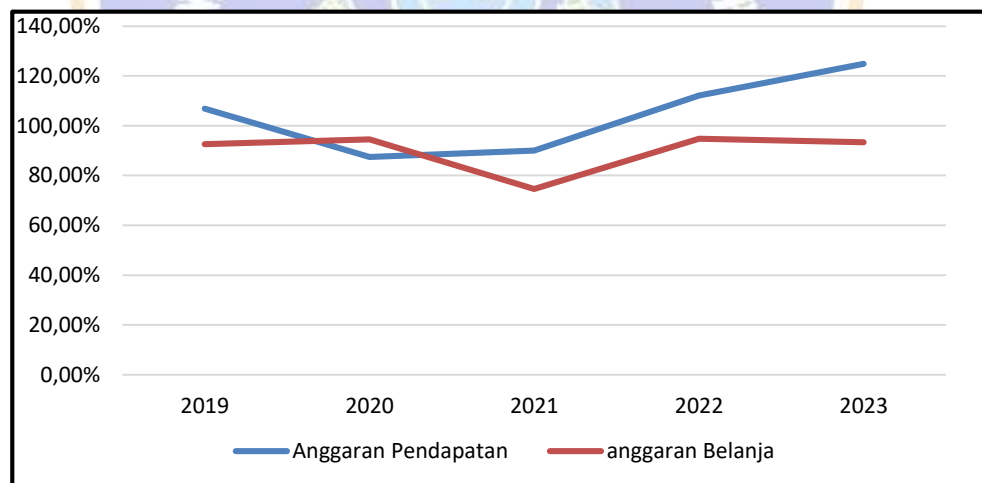
pembentukan dan susunan perangkat daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2018 tentang tugas, susunan organisasi, tanggung jawab, dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Selain itu, Bapenda memiliki sejumlah tugas, termasuk membuat peraturan terkait pajak, retribusi, sumber pendapatan lain, bagi hasil pajak, dan dana perimbangan.

Melalui dana publik yang dikelola maka perlu pengawasan terhadap akuntansi pemerintah dengan perencanaan dan pengendalian anggaran sehingga dalam mengelola dana retribusi dan pajak di bapenda dapat dikelola secara lebih efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Kinerja laporan keuangan kemudian dapat diukur untuk pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Value for money merupakan suatu pengertian yang dapat digunakan untuk menilai metrik kinerja keuangan, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pengukuran kinerja anggaran berguna untuk menilai efektivitas program pemerintah terhadap target keluaran program (Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi et al. 2023). Landasan penilaian kinerja organisasi sektor publik adalah gagasan tentang nilai uang (Karina et al. 2022). Input, output, dan outcome harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk menilai kinerja organisasi sektor publik. Perusahaan sektor publik dapat mengukur nilai uang dan menilai akuntabilitas kinerja keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahunan. (Bintang dkk., 2024). Berikut merupakan data laporan Realisasi dan Badan Pendapatan Provinsi Bali 2019 – 2023 :

Tabel 1.1: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2019–2023

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Presentase
2019	Rp 3.294.165.267.548	Rp 3.519.275.973.409	106,83 %
2020	Rp 3.011.250.208.770	Rp 2.633.162.063.127	87,44 %
2021	Rp 2.769.827.229.488	Rp 2.494.600.847.526	90,06 %
2022	Rp 2.901.149.508.988	Rp 3.252.977.499.024	112,13 %
2023	Rp 3.289.543.075.629	Rp 4.106.710.111.959	124,84 %
Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Presentase
2019	Rp 188.132.493.444	Rp 174.168.789.376	92,58 %
2020	Rp 150.681.090.775	Rp 142.452.370.127	94,54 %
2021	Rp 155.679.617.723	Rp 116.203.799.449	74,64 %
2022	Rp 144.944.796.065	Rp 137.327.687.558	94,74 %
2023	Rp 166.504.107.018	Rp 155.383.489.971	93,32 %

Sumber : LRA APBD BAPENDA Provinsi Bali 2019 - 2023



Gambar 1.1 Grafik Anggaran Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat pada pada tahun 2019 presentase anggaran pendapatan sebesar 106, 83 % dan anggaran belanja sebesar 92,58 % mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 – 2021 anggaran pendapatan mengalami defisit dengan presentase anggaran dan realisasi pendapatan sebesar 87,44 % & 90,06 % yang dimana realisasi pendapatan

lebih kecil dibandingkan anggaran pendapatan dan anggaran belanja mengalami penurunan dengan presentase sebesar 94,54% dan 74,64%.

Pada tahun 2022 – 2023 anggaran pendapatan dan belanja kembali normal sebab sektor pariwisata mulai pulih secara perlahan dengan presentase anggaran pendapatan sebesar 112,13 % & 124,84 % serta anggaran dan realisasi belanja menurun sebesar 94,74 % dan 93,32 % . Jadi berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah anggaran pendapatan dan belanja BAPENDA dapat direalisasikan secara ekonomis, efektifivitas, dan efesiensi dalam peningkatan LRA dari tahun 2019 – 2023 dengan judul **“Analisis *Value For Money* untuk Menilai Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penurunan anggaran dari tahun 2019 - 2020 sebesar 87,44% dengan selisih sebesar 0,13% dari tahun 2019 yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan. Selain itu, realisasi pendapatan terpantau tidak mencapai target anggaran sehingga menyebabkan terjadi defisit anggaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Hanya memfokuskan kinerja keuangan pada periode 5 tahun karena pada dasarnya konsep *value for money* adalah konsep anggaran berbasis kinerja secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

2. Hanya memfokus pada Badan Pendapatan Provinsi Bali karena Bali memiliki struktur ekonomi yang bergantung pada sektor pariwisata, yang berdampak langsung pada pendapatan daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dinilai dari analisis *value for money*?
2. Kendala apa yang dialami dalam meningkatkan kinerja keuangan?
3. Bagaimana cara meningkatkan kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dinilai dari analisis *value for money*.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dialami dalam meningkatkan kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian tersebut dapat berguna bagi :

- a) Aspek Teoritis

Hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi BAPENDA

Provinsi Bali sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan terkait kinerja keuangan dan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b) Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasannya dalam memahami konsep *value for money* dengan menerapkannya melalui penelitian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

c) Bagi Universitas

Penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber referensi bacaan di perpustakaan serta dapat menjadi penambahan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa.

d) Bagi BAPENDA Provinsi Bali

Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempertimbangkan anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Bapenda Provinsi Bali agar realisasi dapat meningkat dan mencapai target pada tahun berikutnya.

